

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang merupakan Negara yang memiliki jumlah populasi atau penduduk terbanyak peringkat keempat di dunia dengan jumlah populasi 268.074.600 juta jiwa penduduk Indonesia dengan komposisi keragaman budaya , agama , tradisi yang ada di Indonesia merupakan suatu berkah sekaligus terdapat juga hambatan di dalamnya , dalam keberagaman ini Indonesia juga sejalan dengan peningkatan pertumbuhan penduduk tidak selaras dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia itu sendiri yang membuat tingkat pendapat Perkapita penduduk produktif yang berpengaruh dalam tingkat kemiskinan yang ada di masyarakat Indonesia .

Dalam meningkatkan keberhasilan menangani masalah kemiskinan adalah dengan dilakukanya pembangunan di Indonesia yang juga diinginkan oleh masyarakat yang ingin semua kebutuhan mereka terpenuhi tetapi masih banyak masyarakat yang berada di dalam keluarga tidak mampu atau keluarga miskin yang menurut jumlah data dari Badan Pusat Statistika (BPS) memberikan data jika masyarakat miskin di Indonesia per maret 2019 sebanyak 25,14 persen atau 9,41 persen dari 260 juta penduduk di Indonesia , pengentasan kemiskinan di Indonesia masih menjadi prioritas dalam program-program yang memiliki tujuan terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat yang berada di pemerintahan seperti kelayakan tempat tinggal bagi masyarakat miskin .

Sebagaimana kita ketahui kemiskinan di masyarakat menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang mencakup kebutuhan fisik , psikis , sosial , dan spiritual bagi masyarakat salah satunya kebutuhan rumah layak huni yang terbentur dengan pengetahuan masyarakat tentang kelayakan sebuah hunian , masyarakat hanya menilai rumah sebagai tempat singgah dan ketidak bisaan memenuhi kelayakan sebuah hunian bagi keluarga karena pendapatan mereka yang hanya bisa digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka . permasalahan sosial tentang kebutuhan rumah layak huni ini akan menjadi suatu masalah besar jika tidak cepat di selesaikan oleh pemerintah , oleh karena itu pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat miskin yang sudah menjadi hak mereka sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H hasil Amandemen ke IV yaitu “ Rumah adalah salah satu hak dasar setiap warga Negara Indonesia , maka setiap warga Negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat “ .

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomer 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) dan Sarana Prasarana Lingkungan , yang merupakan upaya penyelenggaraan program-program dalam penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia dalam mewujudkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang juga program ini merupakan suatu program dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaanya program ini dibedakan pada 2 sasaran yaitu bantuan untuk masyarakat miskin di pedesaan dan bantuan untuk masyarakat di perkotaan .

Dalam peraturan yang lain yaitu Peraturan Gubernur Nomer 46 tahun 2011 tentang Pedoman perbaikan rumah tidak layak huni yang di laksanakan di dinas sosial kabupaten Cirebon dalam rangka penanggulangan kemiskinan dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang merupakan penanggulangan masalah kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat di kabupaten Cirebon , RS-Rutilahu adalah sebuah program atau kegiatan yang di lakukan pemerintah dalam upayah penanggulangan fakir miskin yang di selenggarakan oleh Kementrian Sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat fakir miskin program ini memiliki prioritas dalam perbaikan yaitu atap , lantai, dan dinding serta fasilitas MCK yang ada di dalam rumah kegiatan ini di lakukan bersama-sama dengan kelompok yang berada di desa .

RS-Rutilahu memang program pemerintah pusat yang di laksanakan oleh Dinas Sosial yang di salurkan langsung ke kelompok sosial yang beradi desa tempat penyelenggaraan seperti di desa Bayalangu Kidul memiliki 2 kelompok yaitu kelompok mawar dan kelompok kambogja, dalam penentuan masyarakat yang menerima bantuan ada beberapa syarat yang harus di penuhi:

1. Dinding atau Atap bahkan keduanya dalam kondisi rusak yang dapet membahayakan keselamatan penghuni .
2. Dinding atau Atap bahkan keduanya terbuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk
3. Lantai terbuat dari tanah , papan , bambu , semen atau keramik dalam keadaan rusak .
4. Tidak memiliki tempat mandi , cuci , dan kakus .
5. Luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang.

6. Fakir miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.
7. Belum pernah mendapat bantuan Rumah tidak layak huni sebelumnya.
8. Memiliki identitas warga Negara Indonesia.
9. Tanah tinggal milik sendiri yang di buktikan dengan adanya sertifikat , surat keterangan dari camat selaku pembuat akta tanah.

Di Desa Bayalangu Kidul sendiri tahun 2019 telah melaksanakan program Rumah tidak layak huni ke pada 20 rumah masyarakat miskin jadi pengimplementasian kebijakan program dari Dinas Sosial kabupaten Cirebon ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang merupakan pedoman dalam merealisasikan program tersebut .

“ peran penting dari suatu pengimplementasian kebijakan adalah kemampuan dalam pengidentifikasian Dimensi –dimensi yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal dalam keseluruhan proses implementasi “. Oleh Daniel Mazmanian & Paul Sabatier dalam Leo Agustinio (2016: 146)

Dimensi-dimensi dalam klasifikasi tersebut di kategorikan dalam 3 kategori besar dan 1 Dimensi tambahan yaitu :

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap.
2. Tingkat dan Ruang Lingkup perubahan Perilaku yang di kehendaki .
3. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat.

4. Variabel-Variabel di Luar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi.

Proses implementasi kebijakn program Rumah tidak Layak Huni di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon tepatnya di Desa Bayalangu Kidul , Kecamatan Gegesik , Kabupaten Cirebon dirasakn masih kurang begitu efektif diantaranya :

1. Masyarakat yang mendapat bantuan salah persepsi mengangap bantuan Pemerintah sama seperti program di Televisi karena kurangnya Sosialisasi.
2. Bantuan berupa barang-barang dan uang 2,5 juta di rasa kurang dan membebankan Masyarakat karena kekurangan di bebankan pada penerima dan menutupinya dengan pinjam atau hutang .
3. Banyak Rumah yang lebih tidak layak , tidak mendapat bantuan dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yaitu tanah rumah milik sendiri.

Berdasarkan masalah- masalah yang terdapat di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni yang hasil dari penelitian tersebut akan di tuangkan dalam sebuah Skripsi dengan judul sebagai berikut :

“ Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni (RS- Rutilahu) dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Bayalangu Kidul Kecamtan Gegesik Kabupaten Cirebon. “

1.2 Rumusan Masalah .

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang sudah di paparkan di atas maka peneliti mengetahui dan bisa membuat rumusan masalah yaitu implementasi kebijakan program Rehabilitasi Sosial - Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon masih belum optimal dan peneliti mengambil Studi kasus di Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon .

1.3 Identifikasi Masalah .

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas Maka peneliti mengidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas Sosial yang di laksanakan di Desa Bayalangu Kidul .
2. Bagaimana Hambatan – Hambatan apa saja yang di hadapi pelaksana program RS-Rutilahu.
3. Bagaimana Upaya yang di lakukan Dinas Sosial dan Pelaksana Kelompok untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Program RS-Rutilahu.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Cirebon , adapun tujuan yang di lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas Sosial yang di laksanakan di Desa Bayalangu Kidul.
2. Untuk Mengetahui Hambatan – Hambatan apa saja yang di hadapi pelaksana program RS-Rutilahu .
3. Untuk Mengetahui Upaya apa yang di lakukan Dinas Sosial dan Pelaksana Kelompok untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Program RS-Rutilahu .

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini ada pengembangan ilmu Administrasi Negara , terutama pada Program Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Sosial , meliputi :

- a. Untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon khususnya di Desa Bayalangu Kidul .
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam implementasi

kebijakan program Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon khususnya di Desa Bayalangu Kidul.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Cirebon terutama pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dan Instansi terkait dalam rangka pemecahan masalah dalam Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon khususnya di Desa Bayalangu Kidul sehingga dimasa yang akan datang Implementasinya diharapkan lebih maksimal lagi .

1.6 Kerangka Pemikiran

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian sosial masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan di bawah kepemimpinan kementerian sosial dan juga di bawa pemerintahan Bupati melalui Sekertariat Daerah . Dinas Sosial melaksanakan tugas pokok membantu kementerian sosial dalam melaksanakan urusan fungsi dan tugas perbantuan di bidang mengatasi permasalahan tentang masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat .

Dinas sosial melaksanakan program pemerintah di bawah kementerian sosial dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan Rumah Layak huni yang terbukti dalam Peraturan Menteri Sosial (Permesos) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni dan Sarling dalam menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada di masyarakat. Dan juga diatur oleh peraturan gubernur nomor 46 tahun 2015 tentang Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ini merupakan pedoman tata laksana program RS- Rutilahu tersebut.

Pelaksanaan kebijakan tersebut salah satu tahapan terpenting dalam siklus sebuah kebijakan adalah implementasi Kebijakan atau pelaksanaan dari apa yang sudah diputuskan oleh para pengambil keputusan atau pemimpin yang menjadikan pengimplementasian dianggap tidak penting padahal implementasi sangat penting karena tanpa adanya pelaksanaan maka keputusan itu tidak akan berarti apa-apa.

Implementasi dalam Kamus Bahasa Indonesia, : “ Implementasi adalah Pelaksanaan atau Penerapan menurut Pengertian Umum yaitu suatu tindakan atau Pelaksana Rencana yang Telah disusun secara Cermat dan Rinci (matang) ”. Implementasi juga dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata “ to Implement” yang menjelaskan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilaksanakan menurut norma-norma yang berlaku dalam mencapai tujuan kegiatan .Implementasi juga merupakan penyedia sarana dalam menjalankan sesuatu yang menyebabkan dampak berupa undang-undang , peraturan , pemerintah , atau keputusan pengadilan

dalam kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan suatu kehidupan bernegara .

Sedangkan menurut ahli yang lain mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan :

” Pelaksanaan Keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan acara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.” (Mazmanian & Sabatier dalam Leo Agustino (2016:128))

Dalam buku Leo Agustino juga Mazmanian & Sabatier mengemukakan kemampuannya dalam mengidentifikasi Dimensi – dimensi yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, dengan satu dimensi tambahan yaitu:

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap.
2. Tingkat dan Ruang Lingkup perubahan Perilaku yang di kehendaki .
3. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat.
4. Variabel-Variabel di Luar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi.

Kategori-kategori tersebut dijadikan teori dalam penyusunan Skripsi ini sehingga pada uraian selanjutnya akan lebih mendetail .

1. Mudah atau Tidaknya Masalah .

Kategori yang pertama bertujuan agar tercapainya suatu kebijakan menurut Mazmanian & Sabatier (dalam Leo Agustino 2016 : 147) yaitu Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi:

a. Kesukaran-kesukaran Teknis .

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk di antaranya: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Di samping itu, tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu.

b. Keberagaman Perilaku yang Diatur.

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana (aparatur, administrasi, atau birokrat) di lapangan.

c. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran.

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), besar peluang untuk memobilisasikan maka semakin dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan .

2. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Dikehendaki.

Kategori yang kedua bertujuan agar tercapainya suatu kebijakan menurut Mazmanian & Sabatier (dalam Leo Agustino 2016 : 147-148) yaitu tingkat dan ruang lingkup perubahan yang di kehendaki.

Perilaku yang Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar atau sulit para pelaksana mencapai keberhasilan. Artinya, ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan jika tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.

3. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat.

Kategori yang ketiga yang bertujuan agar tercapainya suatu kebijakan menurut Mazmanian & Sabatier (dalam Leo Agustino 2016 : 148-149) yaitu kemampuan kebijakan menstruktur proses Implementasi secara tepat . Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:

- a. Kecermatan dan Kejelasan Penjenjangan Tujuan-tujuan Resmi yang akan Dicapai.

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk- petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas atau urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

- b. Keterandalan Teori Kausalitas yang Diperlukan.

Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

- c. Ketetapan Alokasi Sumber Dana.

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

- d. Keterpaduan Hirarki di Dalam Lingkungan dan di Antara Lembaga-lembaga atau Instansi-instansi Pelaksana.

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan, dan lembaga alpa dilaksanakan, maka koordinasi antar-instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

- e. Aturan-aturan Pembuat Keputusan Badan-badan dari Pelaksana.

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang- undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

- f. Kesepakatan Para Pejabat Terhadap Tujuan yang Termaktub dalam Undang-undang.

Kesepakatan yang Para pejabat pelaksana diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena, top-down policy bukanlah perkara yang mudah untuk diimplankan pada para pejabat pelaksana di level memiliki lokal.

- g. Akses Formal Pihak-pihak Luar.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh mana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor di luar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini

maksudnya agar kontrol pada para pejabat pelaksanaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4. Dimensi- dimensi di Luar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi.

Kategori selanjutnya yang merupakan tambahan dan penyempurna dari kategori sebelumnya yang bertujuan agar tercapainya suatu kebijakan menurut Mazmanian & Sabatier (dalam Leo Agustino 2016 : 150-151) yang merupakan variabel dari luar yang juga berpengaruh dalam implementasi kebijakan yaitu :

a. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi.

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang- undang. Karena itu, eksternal faktor juga menjadi hal penting keberhasilan untuk diperhatikan suatu upaya guna pengejawantahan kebijakan publik.

b. Dukungan Publik.

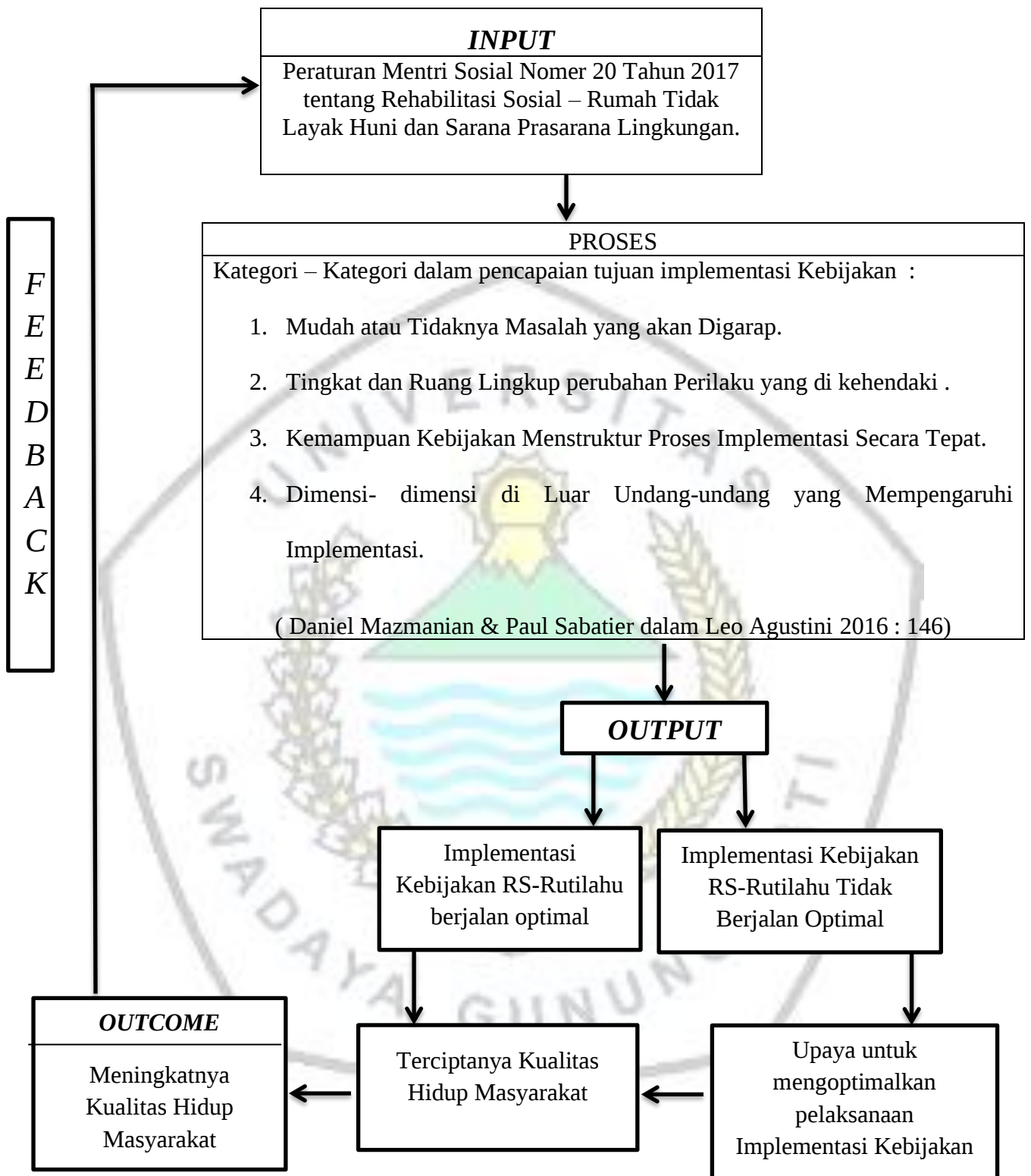
Hakikat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

c. Sikap dan Sumber-sumber Masyarakat.

Dimiliki Kelompok yang Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam local genius (kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Dan, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat.

d. Kesepakatan dan Kemampuan Kepemimpinan Para Pejabat Pelaksana.

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruh- nya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu kemampuan berinteraksi antarlembaga atau individu di dalam lembaga menjadi hal penting atas keberhasilan kinerja kebijakan untuk menyukseskan implementasi kebijakan publik .



Gambar 1 . 1

Kerangka Pemikiran.

1.7 Definisi Operasional konsep penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Untuk Menyamakan Persepsi dan Pemahaman dalam Penelitian ini di kemukakan definisi operasional sebagai berikut :

a. Implementasi kebijakan

Impelemntasi Kebijakan adalah ” Pelaksanaan keputusan yang berbentuk Undang-undang , Perintah-perintah , Keputusan Eksekutif yang penting , Keputusan Badan peradilan pada umumnya Keputusan-Keputusan ini mengidentifikasi suatu masalah yang harus diatasi , dan secara tegas dalam tujuan dan sasaran yang ingin di capai dan mengatur Proses Impelementasinya .” yang di kemukakan oleh Mazmanian & Sabatier dalam Leo Agustino (2016 : 128)

b. Program Rehabilitasi Sosial- Rumah tidak Layak Huni

Salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan kementrian sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan atau rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap , lantai, dan dinding serta fasilitas MCK .

c. Kualitas hidup Mayarakat

Kadar baik buruknya kondisi sesuatu untuk terus ada , bergerak , dan bekerja sebagaimana semestinya dan juga merupakan suatu rasa kepuasan seseorang individu akan keidupanya secara menyeluruh .

d. Dinas Sosial

Unsur pelaksana urusan pemerintah bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah yang di pimpin oleh kepala dinas yang bertanggung jawab kepada bupati dan memiliki tugas membantu Bupati melaksanaka

n urusan pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada kabupaten .

e. Studi kasus

Kegiatan pembelajaran dan pemahaman masalah yang kompleks yang bertujuan untuk menentukan factor-faktor apa saja yang dapet membuat kesuksesan dan kegagalan pada suatu instansi .

f. Desa Bayalangu Kidul

Salah satu desa di kecamatan Gegesik yang berbatasan dengan kecamatan arjawinangun dan merupakan batas kecamatan .

1.8 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasionalisasi konsep penelitian dilakukan dengan cara menjabarkan konsep penelitian kedalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang di gunakan , dimensi tersebut di jabarkan menjadi parameter-parameter .

Untuk mempermudah menganalisis data , maka konsep penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu : (implementasi Kebijakan) di Operasikan atau di jabarkan dengan parameter seperti data yang ada di tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
1	2	3
Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanian & Paul Sabatier (dalam Leo Agustino 2016 : 146)	1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap	1 Kesukaran-kesukaran Teknis 2 Keberagaman Perilaku yang Diatur. 3 Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran.
	2. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Dikehendaki	1. Jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki 2. Tingkat pencapaian hasil kebijakan
	3. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat	1. Kecermatan dan Kejelasan Penjenjangan Tujuan-tujuan Resmi yang akan Dicapai. 2. Keterandalan Teori Kausalitas yang Diperlukan. 3. Ketetapan Alokasi Sumber Dana.

1	2	3
		4. Keterpaduan Hirarki di Dalam Lingkungan dan di Antara Lembaga-lembaga atau Instansi-instansi Pelaksana. 5. Aturan-aturan Pembuat Keputusan Badan-badan dari Pelaksana. 6. Kesepakatan Para Pejabat Terhadap Tujuan yang Termaktub dalam Undang-undang. 7. Akses Formal Pihak-pihak Luar.
	4. Dimensi-Dimensi di Luar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi.	1. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi. 2. Dukungan Publik. 3. Sikap dan Sumber-sumber Masyarakat. 4. Kesepakatan dan Kemampuan Kepemimpinan Para Pejabat Pelaksana.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini mengambil metode penelitian Kualitatif ,

Seperti yang di paparkan sebagai berikut :

“ penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial , dan perspektifnya di dalam dunia , dari segi konsep , perilaku , persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti , jadi menjelaskan tentang peranan penting dari apa yang seharusnya diteliti yaitu konsep, perilaku , persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti . Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah Wawancara , Pengamatan atau Observasi , dan pemanfaatan dokumen. Dengan kata lain penelitian ini di sebut penelitian yang tidak menggunakan atau mengadakan perhitungan .” Menurut Jane Richie dalam Moleong (2014 : 6)

1.8 .2 Informan dan Teknik pemilihan Informan

” informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian jadi ,jadi dia harus memiliki banyak pengalaman tentang latar penelitian . dia wajib menjadi sukarelawan dalam penelitian walaupun hanya bersifat formal dan memberikan pandangan dari segi orang dalam , tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut . “Menurut Moleong (2014 : 132)

Teknik yang digunakan peneliti adalah teknik *purposive sampling* yaitu teknik dalam pengambilan sample data dengan pertimbangan tertentu . jadi informan secara garis besar adalah orang-orang yang banyak mengetahui masalah yang diteliti dan informan di bagi menjadi 2 informan yaitu :

a. Informan Kunci .

Informan kunci adalah orang-orang yang banyak mengetahui masalah yang diteliti. informan kunci dalam penelitian ini ialah kepala dinas sosial kabupaten Cirebon dan Pelaksana Kelompok .

b. Informan Pendukung .

Informan pendukung adalah orang-orang yang berada diluar informan kunci yang memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, informan pendukung adalah beberapa pegawai – pegawai di dinas sosial , dan Masyarakat yang Mendapat Bantuan.

1.9 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah hal penting dalam sebuah penelitian oleh karena itu seorang peneliti harus memiliki keterampilan , ketelitian dan kecakapan dalam pengumpulan data dan mendapatkan data yang valid . pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar dalam mendapatkan data yang di perlukan . teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Studi Kepustakaan .

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian dengan mempelajari buku dan peraturan-peraturan baik dari pusat dan dari daerah untuk menjadi landasan dalam memecahkan masalah penelitian .

2. Studi Lapangan .

Teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi penelitian melalui teknik sebagai berikut :

a. Data Primer.

Data yang diperoleh secara langsung dan memberikan ke pengumpul data yang bersumber dari pengamatan dan catatan dalam penelitian yang berlangsung dan didapat melalui informan kunci maupun informan tambahan.

b. Data Sekunder .

Data pendukung yang di dapatkan secara tidak langsung yang di perlukan sebagai referensi dan bahan acuan , yaitu melakukan studi literature atau kepustakaan .

c. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara penulisan mengadakan pengamatan secara langsung di objek penelitian , tetapi penulisan tidak terlibat langsung dalam proses kerja .

d. Wawancara atau quesioner

Pengumpulan data dengan cara menggunakan Tanya jawab dengan informasi kunci maupun informan pendukung dan juga mengajukan pertanyaan secara tulisan kepada informan .

Secara pedoman peneliti harus memiliki patoakan pertanyaan agar tidak melewati batas pembahasan dalam sesi Tanya jawab dengan informan dan secara questioner agar mempermudah peneliti mendaapt data yang banyak darai informan karan lebih mudah secara tepat bahsan dan penertianya .

e. Dokumentasi

Menelusuri dokumentasi untuk mendaapt informasi yang mendukung analisi dan interpretasi data, teknik pengumpulan data ini berupa foto bisa atau video dan rekaman .

1.10 Teknik Pengujian Keabsahan

Dalam sebuah Penelitian Kualitatif pasti memiliki Standar (Variabel) dan keteradaan (Rehabilitasi). Teknik penguji kebsahan menggunakan teknik triangulasi dimana teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut (Moleong 2014: 330).

Pada penelitian ini penulis menggunakan perbandingan sumber yaitu perbandingan dan pengecekan balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam Moleong 2014: 330).

Dalam penulisan ini peneliti membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan tapi jangan sampai banyak berharap bahwa hasil perbandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran yang penting disini mengetahui alasan-alsan terjadinya perbedaan tersebut (Patton dalam Moleong 2014 : 331) .

Pengecekan keabsahan data dengan sumber menurut Moleong (2014 : 331)

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil Wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang di katakananya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang dengan situasi penelitian dengan apa yang di katakana sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa , orang yang berpendidikan menengah atau tinggi , orang berada, orang pemerintahan.

5. Membandingkan hasil Wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

1.11 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah teknik dekriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian kemudian data dianalisis dan diinterpretasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan dan data penudkung penelitian .

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2017 : 246-252) mengemukakan bahwa “ aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan langsung secara terus menerus sampai tuntas , sehingga data sudah jenuh” . aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. *Data Reductor* (Reduksi data)

karena jumlah data yang diperoleh cukup banyak dan di catat secara terperinci dan teliti maka dilakukan analisis data dengan reduksi data yaitu merangkum , memilih hal-hal pokok , memfokuskan pada hal-hal penting dan dicari pola dan temanya maka data yang sudah di reduksi akan menjadi gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya atau mencari bila diperlukan . Reduksi data bisa dibantu dengan Peralatan Elektronik seperti Komputer mini , dengan memberi kode pada aspek-aspek tertentu .

2. *Data Display*

Mendisplay data dalam penelitian kualitatif dengan menyajikan data dalam bentuk Uraian singkat , bagan , hubungan antar kategori , flowcard, dan sejenisnya dengan display data akan mempermudah pemahaman apa yang terjadi , merencanakan kerja. Dalam mendisplay data disarankan selain dengan teks yang neratif dapat juga berupa grafik , matrik, network (jejaring kerja) dan chart.

3. *Conclusion Drawing atau Verivication*

Penarikan kesimpulan dan verivikasi . kesimpulan awal masih berupa sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti

yang valid , dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data , maka kesimpulan maka kesimpulan yang di dapat adalah kesimpulan yang *Credible*.

1.12 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.12.1 Lokasi Penelitian

Dalam Penulisan Proposal ini penulis melakukan penelitian di desa Bayalangu kidul , Kecamatan Gegesik , Kabupaten Cirebon , yang mana lokasi penelitian ini memiliki target lokasi atau objek penelitian .

Adapun peneliti memilih lokasi tersebut menjadi lokasi penelitian dikarenakan sebagai berikut :

- a. Adanya permasalahan di lokasi yang harus di pecahkan dengan suatu solusi .
- b. Data yang di butuhkan dalam penelitian mudah di peroleh dan mudah di pahami penulis .
- c. Lokasi penelitian sangat mudah di jangkau .

1.12.2 Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan penulis selama 6 bulan yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 , untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel.1.2
Jadwal Penelitian.

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN	TAHUN 2020																											
		BULAN	MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS							
		MINGGU	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	TAHAP PERSIAPAN																													
	Studi literatur		■							■																				
	Pengamatan		■																											
	Penyusunan			■	■	■																								
	Bimbingan Proposal					■				■	■	■																		
	Seminar Proposal						■	■	■		■	■	■																	
2	TAHAP PELAKSANAAN																													
	Wawancara									■	■	■																		
	Pengolahan Data										■	■	■	■	■															
	penyusunan Draf														■	■	■	■												
	Bimbingan Draf																■	■	■	■										
3	TAHAPAN AKHIR																													
	Seminar Skripsi																							■	■					
	Sidang Skripsi																								■	■	■			

